



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 172.1 / 25 / 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BLORA
NOMOR : 172.1/12/2015 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas penyusunan dan pembahasan serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Blora tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 172.1/12/2015 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora;

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Blora Nomor 050/1125 tanggal 6 Juni 2016 perihal Prolegda Kabupaten Blora Tahun 2016;
2. Hasil Musyawarah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 13 Juni 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dalam Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan DPRD ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 13 Juni 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA



KETUA,
BAMBANG SUSILO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada YTH :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Bupati Blora.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BLORA
 Nomor : 172.1 / 25 / 2016
 Tanggal : 13 Juni 2016

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	JUDUL RANPERDA	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KET
1	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan	Regulasi tentang Pendidikan	DPRD	Baru
2	Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR)	Regulasi tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan	DPRD	Baru
3	Kelertiban Umum	Regulasi tentang Kelertiban Umum	DPRD	Baru
4	Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan berbasis Gender dan Anak	Regulasi tentang Kekerasan Gender dan Anak	DPRD	Baru
5	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Regulasi tentang retribusi pelayanan pasar	DPRD	Perubahan
6	Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Regulasi tentang retribusi pasar grosir / pertokoan	DPRD	Perubahan
7	Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame	Regulasi tentang Penyelenggaraan Reklame	PEMKAB	Perubahan
8	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.	Regulasi tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	PEMKAB	Perubahan
9	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung	Regulasi tentang Bangunan Gedung	PEMKAB	Perubahan
10	APBD Kabupaten Biora Tahun Anggaran 2017	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PEMKAB	Baru
11	Perubahan APBD Kabupaten Biora Tahun Anggaran 2016	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PEMKAB	Baru
12	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Biora Tahun Anggaran 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PEMKAB	Baru
13	Izin Gangguan (HO)	Regulasi penerbitan izin gangguan	PEMKAB	Baru
14	Penyelenggaraan Penanaman Modal	Regulasi tentang Penanaman Modal di Daerah	PEMKAB	Baru
15	Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan perencanaan Daerah	PEMKAB	Baru
16	Kepala Desa	Regulasi tentang Kepala Desa	PEMKAB	Baru

NO	JUDUL RANPERDA	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KET
17	Perangkat Desa	Regulasi tentang Perangkat Desa	PEMKAB	Baru
18	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa	PEMKAB	Baru
19	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Regulasi mengenai penyelenggaraan kepariwisataaan, TDUP, Penyelenggaraan Karaoke dan Hiburan Malam	PEMKAB	Baru
20	Penyertaan Modal	Regulasi tentang penyertaan modal Pemkab pada BUMID	PEMKAB	Baru
21	Penyelenggaraan tugas dibidang Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Blora	Regulasi tentang Migas di daerah	PEMKAB	Baru
22	Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa	Regulasi tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa	PEMKAB	Baru
23	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Perubahan tentang regulasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	PEMKAB	Perubahan
24	Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Regulasi tentang retribusi pelayanan kesehatan	PEMKAB	Perubahan
25	Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Regulasi tentang retribusi tempat khusus parkir	PEMKAB	Perubahan
26	Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Blora	Regulasi tentang menara telekomunikasi	PEMKAB	Perubahan
27	Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031	Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Daerah	PEMKAB	Perubahan

NO	JUDUL RANPERDA	POKOK-POKOK MATERI YANG DIATUR	PEMRAKARSA	KET
28	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah	Regulasi tentang tarif pajak daerah	PEMKAB	Perubahan
29	Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Regulasi tentang pemakaian kekayaan daerah	PEMKAB	Perubahan
30	Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	Pencabutan Regulasi tentang biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	PEMKAB	Baru
31	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Regulasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	PEMKAB	Baru
32	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016 - 2020	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 Tahun Kabupaten Blora	PEMKAB	Baru
33	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blora	Regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Blora	PEMKAB	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA



 Ketua
 BAMBANG SUSILO